PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2018	Hal.: 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Deadline 30 September

PONTIANAK—APBD Perubahan tahun 2018 belum juga ketuk palu. Sejumlah persoalan anggaran masih dibahas alot, terutama mengenai menyisir anggaran "kurang penting" dan defisit anggaran. Padahal deadline ketuk palu sudah berada di depan mata. Mulyadi Haji Yamin, salah satu tim anggaran DPRD Kalbar dari fraksi Golkar misalnya menjelaskan lamanya APBD Perubahan 2018 ketuk palu karena ada alasannya.

"Sampai sekarang di DPRD Kalbar belum ada persoalan terlalu mencuat. Yang pasti Banmus DPRD Kalbar sudah menetapkan jadwalnya. Hanya memang persoalannya berada di eksekutif di sana," ucapnya.

Persoalan tersebut diperkirakannya mengenai bagaimana melakukan penertiban dan penyisiran anggaran. "Silakan saja lakukan sepanjang demi kebaikan masyarakar Kalbar. Namun memang ada limit waktu penetapan APBD Perubahan 2018," kata dia. Berdasarkan ketentuan dan aturan, memang *deadline* ketuk palu pembahasan APBD Perubahan harusnya sebelum tanggal 30 September 2018.

Deadline 30 September

Sambungan dari halaman 9

Draft Perda APBD Perubahan tersebut harusnya sudah diketuk palu atau diserahkan. Hanya memang andai ada alasan paling kuat, juga tidak ada persoalan. "Tetapi alasannya cukup kuat menunda ketuk palu tersebut," ucap Ketua Komisi II DPRD Kalbar membidangi keuangan ini.Sebelumnya memang pada senin kemarin rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar terhadap Rencana Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, ditunda lagi. "Rapat paripurna ini ditunda sampai dijadwalkan Banmus (Badan Musyawarah)," ucap Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ketika menjadi Pimpinan Paripurna tersebut.Rapat paripurna sempat dibuka sekitar pukul 10.45 Wib. Kemudian langsung ditutup sekitar 10 menit ke depan.

Alasannya selain jumlah peserta tak kourum, juga karena tidak hadirnya Gubernur Kalbar.Dia menjelaskan bahwa Gubernur Kalbar, Sutarmidji sudah menyampaikan permintaan supaya laporan Banggar dan pengesahan APBD Perubahan 2018 ditunda sampai akhir September 2018. "Kami sudah memperoleh informasi tersebut. Akan tetapi belum menerima fisik surat permohonan dari gubernur," ujarnya.

Pendapat anggota DPRD Kalbar yang hadir dan terjadilah kesepakatan penundaan dijadwalkan kembali Badan Mustyawarah (Banmus) DPRD Kalbar setelah mendapat kepastian dari Gubernur Kalbar. ***(den)***